

**LAPORAN PPID PELAKSANA UPT
TAHUN 2018**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

I. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

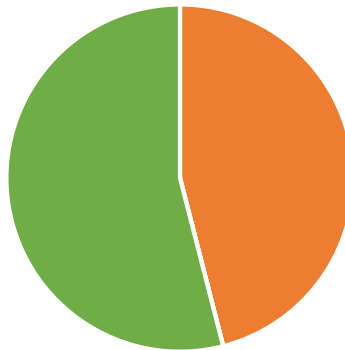
Permohonan informasi publik yang masuk sepanjang tahun 2018 di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat ada sebanyak 37 permohonan yang penjabaran dan infografis dapat dilihat pada table dan grafik di bawah ini.

No	Uraian	Jumlah Permohonan Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	5	5							
2	Februari	5	5							
3	Maret	4	4							
4	April	3	3							
5	Mei	3	3							
6	Juni	1	1							
7	Juli	5	5							
8	Agustus	1	1							
9	Septermber	2	2							
10	Oktober	5	5							
11	November	2	2							
12	Desember	1	1							
	TOTAL	37	37	0	0	0	0	0	0	0

Persentase permohonan berdasarkan kelompok informasi publik tahun 2018

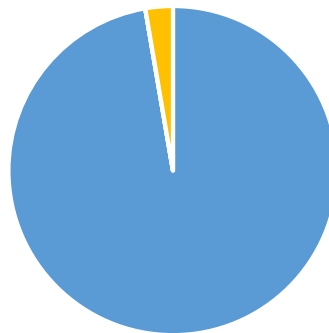


Persentase permohonan berdasarkan media permohonan tahun 2018



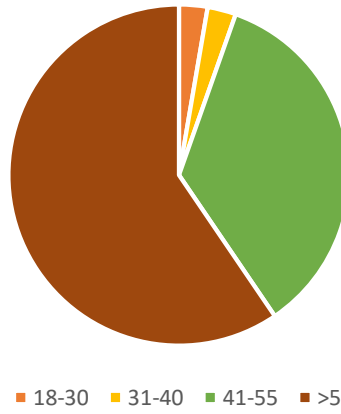
■ layanan online ■ email ■ whatsapp ■ sms/ telepon ■ kunjungan ■ surat

Persentase permohonan berdasarkan latar belakang pemohon tahun 2018

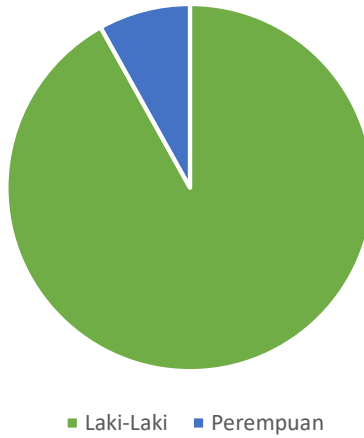


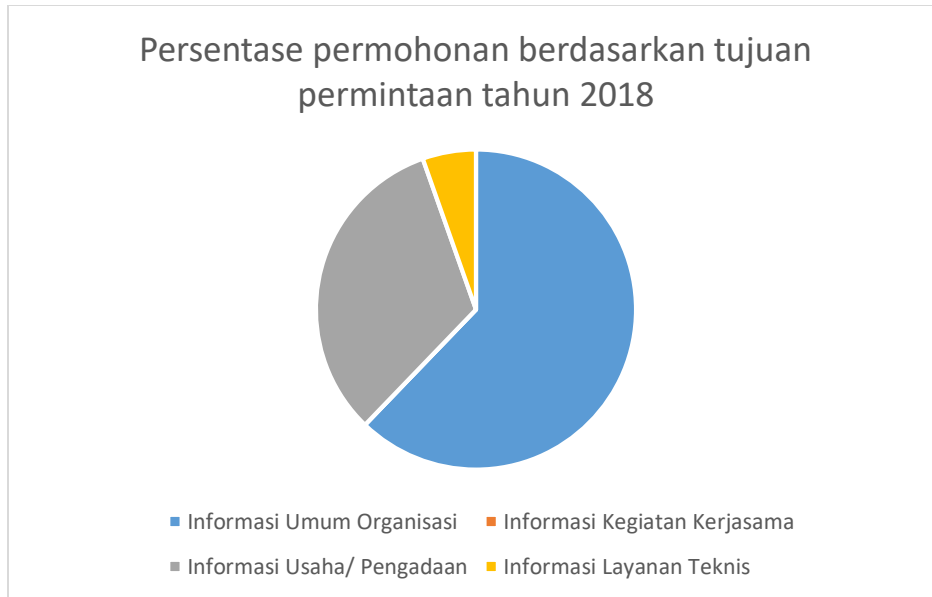
■ PNS/TNI/Polri ■ Pegawai Swasta ■ Wirausaha ■ Pelajar/ Mahasiswa

Persentase permohonan berdasarkan usia pemohon tahun 2018



Persentase permohonan berdasarkan jenis kelamin pemohon tahun 2018





II. Motto dan Maklumat Layanan PPID

a. Motto Layanan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

Melayani dengan Efisien, Akurat dan Terpercaya

b. Maklumat Layanan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

“PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi secara mudah, cepat, akurat dan terpercaya sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku”

III. Sekilas PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

3.1 Visi dan Misi PPID Kementerian Pertanian

Visi

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, dan mudah diakses.

Misi

- Mendorong keterbukaan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian
- Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab PPID Pembantu Pelaksana

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) yaitu sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
- ✓ Daftar informasi publik.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait TIK (Permentan No. 25/2016 yaitu sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan hardware di UK/UPT
- ✓ Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT
- ✓ Monev pelaksanaan PPID
- ✓ Penyediaan konten elektronik

BPTP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Ktps/KP.340/I/12/2011. Dalam struktur organisasi Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk Keputusan tersebut adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Selain informasi yang terkait tugas utamanya, BPTP Papua Barat juga menyelenggarakan layanan penyediaan berbagai informasi lain yang diperlukan publik untuk turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan komprehensif, transparansi dan taat hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat UU KIP agar setiap warga negara bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaannya, karena belum dilengkapi Desk Layanan, pelaksanaan layanan informasi publik diintegrasikan pada pada layanan perpustakaan dan website yang berada dalam pengelolaan Seksi KSPP. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab perpustakaan dan website bersama Seksi KSPP meneruskan permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BPTP (Subbagian Tata Usaha, Seksi KSPP, dan Kelompok Jabatan Fungsional)

IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

Penyampaian informasi publik di BPTP Papua Barat pada tahun 2018 belum dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan belum sepenuhnya dilaksanakan

dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011.

Beberapa kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan adalah:

- a) Pembaharuan rutin website BPTP Papua Barat untuk mengakomodasi pelayanan Informasi Publik secara online melalui penyediaan berbagai laporan Informasi Publik.
- b) Penyampaian laporan wajib berkala (Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat dsb)
- c) Pembuatan dan distribusi publikasi cetak untuk informasi yang diminta oleh petani kooperator kegiatan pengkajian dan pendampingan
- d) Pencetakan dan pemasangan banner pernyataan mutu
- e) Penyediaan informasi teknis unit layanan pengadaan (ULP)
- f) Penyediaan informasi rencana kerja pengadaan barang dan jasa
- g) Penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan nota kesepahaman kepada mitra-mitra kerjasama
- h) Penyediaan informasi hama dan penyakit tanaman

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 (satu) hari kerja. Waktu terlama yang dibutuhkan adalah untuk informasi publik berupa data yang memiliki keterkaitan kerja dengan stakeholder SKPD Provinsi maupun Kabupaten. Isi informasi publik yang disampaikan cukup beragam antara lain informasi tentang permintaan data perkembangan Pengadaan Barang Jasa, permintaan data dan laporan keuangan satker, permintaan permintaan studi kelayakan agribisnis tanaman talas mapia, dsb.

V. SDM dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018 terdapat pergantian pejabat struktural KSPP sehingga terdapat peralihan tugas dan tanggung jawab dari Tim PPID Pembantu Pelaksana UPT lama ke Tim PPID Pembantu Pelaksana yang baru. Adapun susunan Tim PPID yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Mei 2018

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Nicolays Jambang, S.TP, M.Sc	Penata Tingkat I / III d	Pelaksana
2.	Arif Yudo Krisdianto, SP	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota
3.	Rismayanti, SE		Anggota
4.	Haftittah Wuswilahaken D.W.		Anggota

Periode 1 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2018

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M.Si	Penata Tingkat I / IIIId	Pelaksana
2.	Arif Yudo Krisdianto, SP	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Operator
3.	Junita Br Nambela, SP	Penata Muda / IIIa	Operator
4.	Rinjani Alam Pratiwi, SP	Penata Muda / IIIa	Operator

b. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT belum memiliki alokasi khusus dalam DIPA / namun menggunakan anggaran pengelolaan manajemen satker untuk Pengelolaan Website, Pengelolaan Perpustakaan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Implementasi ISO 9001:2015.

VI. Penutup

Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selama tahun 2018, BPTP Papua Barat telah berupaya keras untuk mencapai kinerja yang paling optimal dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi, mendiseminasikan teknologi komoditas strategis, mendampingi pengembangan kawasan pertanian nasional serta tugas- tugas lain yang diamanatkan.

Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BPTP Papua Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2018. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik BPTP Papua Barat dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (good governance).